

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Enny Purnomo. “Dampak Disahkannya Konvensi Cape Town 2001 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Pesawat Indonesia di Indonesia”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2007.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Naskah Ilmiah Persiapan Rancangan Undang-undang (Academic Draft) Tentang Hipotik Pesawat Udara*. Jakarta: BPHN, 1981.
- Clark, Lorne.S. “The 2001 Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment and Aircraft Equipment Protocol: Internationalising Asset-Based Financing Principles for The Acquisition of Aircraft and Engines”. *Journal of Air Law and Commerce*, (Winter, 2004).
- Convention on International Civil Aviation*, ditandatangani di Chicago tanggal 7 Desember 1944.
- Convention on the Internatioanl Recognition of Right in Aircraft*, ditandatangani di Genewa tanggal 19 Juni 1948.
- Convention on International Interest in Mobile Equipment* ditandatangani di Cape Town tanggal 16 November 2001
- Gopalan, Sandeep. “Securing Mobile Asset: The Cape Town Convention and Its Aircraft Protocol”. *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, (Fall 2003).
- Gopalan, Sandeep. “Harmonization of Commercial Law: Lesson from The Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment”. *Law and Business Review of the Americas*, (Spring, 2003)

Hakim, Chappy. *Tantangan Besar Dunia Penerbangan Kita*.  
“<http://www.infopenerbangan.com/opini/opini-publik/1097-tantangan-besar-dunia-penerbangan-kita.html>”. diakses tanggal 20 April 2010.

Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberikan Jaminan*. Jakarta: Ind Hil-Co, 2002.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Penerbangan*. UU Nomor 15 Tahun 1992, LN. Nomor 52 Tahun 1992, TLN. Nomor 3481.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN Nomor 182 Tahun 1998. TLN Nomor 3790.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU Nomor 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996. TLN No. 3632.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*. UU Nomor 42 Tahun 1999. LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perjanjian Internasional*. UU Nomor 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN Nomor 4012.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN. Nomor 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) beserta Protocol to The Convention on International Interests in Mobile Equipmen on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi Tentang*

*Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara*), PP Nomor 8 Tahun 2007. LN. Nomor 39 Tahun 2007

Indonesia. *Undang-undang Tentang Penerbangan*. UU Nomor 1 Tahun 2009. LN No. 1 Tahun 2009. TLN No. 4956.

Isnaeni, Mochamad. *Hipotik Pesawat Terbang*. Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996.

Juwana, Hikmahanto “Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan Dalam Cape Town Convention” dalam *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 28, Nomor 24 Tahun 2009), hlm. 51-57.

Kamelo, H. Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni, 2004.

Kantaadmadja, Mieke Komar. *Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*. Bandung: Alumni, 1989.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor KM 5 Tahun 2006 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Angkutan Udara Penumpang*.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 49) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)*, Nomor KM. 49 Tahun 2009.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Staff Instruction Tentang Prosedur Pencatatan Kuasa yang Tidak Dapat Dicaput Kembali untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor*. SI 47-02.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.

Martono, H.K. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Martono, H.K. dan Ahmad Sudiro. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Mayfield, Kenneth, G. "Special Cape Town Convention Issue". *Aircraft Title News*, (Volume 1, No.1, 28 February 2006).

*Protocol to The Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment*, ditandatangani di Cape Town tanggal 16 November 2001.

"Ratifikasi Cape Town Convention Indonesia Lebih Mudah Sewa Pesawat". *Sinar Harapan*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/02/eko01.html>. diunduh tanggal 23 April 2010.

Saleh, Tamiza dan Sulistiono Kertawacana. "Hipotik Pesawat Udara di Indonesia Dikaitkan Dengan Cape Town Convention 2001", <http://sulistionokertawacana.blogspot.com/2008/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html>. Diunduh tanggal 20 April 2010.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Sukarmin. “Penolakan Terhadap Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Atas Pesawat Udara (Studi Kasus PT. X dan PT. Bank Y)”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2003.

Suri, Priti. and Aditya Gupta. “Cape Town Convention – Impact On Financing The Big Bird”, *Aviation Bulletin II*, (April 2007).

[www.unidroit.org](http://www.unidroit.org), diakses tanggal 20 April 2010.

Yuniarto, Efran. “Penjaminan Pesawat Udara Khususnya Pesawat Terbang dan Helikopter dalam Kaitannya dengan Kedudukan Kreditor sebagai Pemegang Hak Istimewa”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2005.